

KEKUATAN MORAL DAN BUDAYA, MENDUKUNG PEREKONOMIAN INDONESIA: SEBUAH GAMBARAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Endang Rudiati^{1,*}, Anwar Ilmar Ramadhan²

¹Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

²Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

*Email: endang.rudiati@umj.ac.id

Abstrak

“UMKM telah menjadi backbone dan buffer zone yang menyelamatkan negara dari keterpurukan ekonomi”, kalimat ini senantiasa didengung-dengungkan dalam setiap pertemuan para birokrat dan pakar serta pengamat ekonomi. UMKM pun menjadi sorotan dan senantiasa diteropong dalam berbagai masalah nasional berkenaan dengan, penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan kenaikan nilai PDB (Product Domestik Bruto) negara. UMKM diyakini berpotensi memberi sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Secara historis UMKM dalam kegiatan ekonominya lebih menonjol pada moral (agama) dan budaya daripada terstruktur dalam teori-teori profit, maksimalisasi dan free kompetitif. Dalam teori Antropologi Ekonomi kerap dideskripsikan bahwa, proses ekonomi dalam masyarakat UMKM menggambarkan bentuk perilaku yang ber tipe kekerabatan, terikat pada ritual keagamaan, berbagi rezeki dan juga resiko serta menuntut “kepercayaan” dalam transaksi di antara mereka. Fenomena inilah sesungguhnya yang memungkinkan pengusaha UMKM lebih tahan dalam menghadapi krisis, refleksi penelitian penulis terhadap ekonomi usaha kecil di kota Jakarta. Penggambaran bentuk kegiatan ekonomi ini menjadi dasar pemikiran penulis ketika para ahli tengah mencari bentuk sistem ekonomi nasional yang berbasis ekonomi rakyat dan ketika para pelaku UMKM cenderung dijadikan sandaran untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi nasional.

Kata Kunci: ritual agama-budaya, berbagi rezeki dan resiko, kepercayaan, kekerabatan.

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi nasional yang berawal dari tahun 1998, memunculkan gejalanya kembali sejak tahun 2016. Mengutip pendapat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Republika, 20 Februari 2017) bahwa, pertumbuhan ekonomi dunia menunjukkan tren penurunan secara kontinyu sejak 2009 atau setahun setelah

krisis ekonomi global pada 2008. Pernyataan tersebut merupakan pengulangan pada saat ia membuka the 12th World Islamic Economic Forum (WIEF) pada 2 Agustus in Jakarta 2016. Artinya peran UMKM dalam perekonomian Indonesia menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi nasional. Tahun 2016 lalu, pertumbuhan ekonomi dunia menyentuh

jurangnya yang terdalam di angka 3,1 persen. Indonesia yang cukup tergantung dengan penerimaan dari sektor migas, pertambangan, dan perkebunan, lumayan terpuuk dengan anjloknya harga minyak dunia atau harga batu bara. Kinerja ekspor yang menurun dibandingkan impor serta Jatuhnya harga -harga komoditas ekspor Indonesia seperti komoditas pertambangan dan pertanian dll serta tetap bertenggernya dolar AS selama setahun di kisaran angka Rp 13.000 rupiah merupakan sinyal krisis ekonomi. Sejak 2014, kinerja ekspor impor Indonesia tercatat negatif, baru mulai menunjukkan pemulihan di kuartal keempat 2016. Hal ini ditandai dengan defisit APBN yang akhirnya harus memotong jumlah anggaran di APBN -P tahun 2016 diantaranya menghilangkan subsidi tarif dasar listrik bagi pelanggan 900 Watt, melakukan obral SUN dan obligasi dengan bunga yang tinggi, terjadinya deflasi yang disebabkan oleh daya beli masyarakat yang menurun dan bukan oleh kinerja Ekonomi makro yang efisien, serta tingginya NPL perbankan Indonesia yang sudah di atas 5 persen. Ia juga menyebutkan sejumlah risiko eksternal yang masih dimonitor pemerintah adalah rencana kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS atau The Federal Reserve, efek lanjutan dari Brexit (keluarnya Inggris dari Uni Eropa), dan kebijakan proteksionisme yang dijalankan Trump untuk ekonominya, serta kembali terulangnya krisis ekonomi Yunani yang pada 2015 mencapai puncaknya. Selain itu, Indonesia masih rentan terkena imbas dari upaya Cina untuk menyeimbangkan lagi pertumbuhan ekonominya. Ketergantungan Indonesia terhadap ekonomi global diprediksi para ekonom menjadi faktor utama fluktuatifnya kondisi ekonomi Indonesia. Artinya, sepanjang tahun ini faktor eksternal masih menyumbang

risiko yang cukup dominan. Sedangkan di sisi internal atau dalam negeri, Sri meyakini pekerjaan rumah terberat pemerintah masih berupa kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.

Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi merupakan masalah klasik Indonesia yang tidak pernah selesai sejak kemerdekaan 1945. Masa pembangunan dan surplus pangan di era Soeharto tidak berlangsung lama. Sekarang Indonesia dikenal sebagai salah satu negara importir, banyak komoditas kebutuhan masyarakat yang dipenuhi dengan cara impor. Seperti bahan pangan mulai dari beras hingga kedelai pemerintah terus mendatangkannya dari luar negeri. Pemerintah membuka lebar-lebar keran impor akibat perjanjian perdagangan bebas pasca 1998.

Gejala krisis ekonomi 1998 tersebut, 2 (dua) tahun terakhir ini tampak seperti akan berulang. Usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional memiliki peran penting di Indonesia, digadang-gadang sebagai sektor yang tahan terhadap krisis, menjadi ocehan para politisi dan birokrat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Forum Ekonomi Islam Dunia ke-12 (WIEF) 2 Agustus 2016 di Jakarta menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan usaha mikro, kecil dan menengah Indonesia (termasuk start up). Usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini menyumbang 99 persen dari total jumlah perusahaan yang beroperasi di Indonesia dan mereka menghasilkan total 107,6 juta pekerjaan di ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, perusahaan mikro, kecil dan menengah di Indonesia menyumbang 60,6 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Semua

fakta ini menunjukkan pentingnya keberadaan perusahaan tersebut. Sebenarnya, mereka melindungi ekonomi negara itu pada saat guncangan. Namun, sebagian besar perusahaan ini tidak membayar pajak, sementara sebagian besar pekerja tergabung dalam sektor informal. Mengapa UKM yang justru kurang mendapat perhatian pemerintah, yang cenderung mandiri dalam segala hal, modal, pemasaran, kebutuhan bahan baku, distribusi dan kadang bersaing dengan barang pabrikan, dapat lebih eksis dibanding perusahaan besar yang kebanyakan dimiliki oleh pengusaha etnis Cina?

Fenomena yang muncul dari kelompok masyarakat ini (UMKM) di masa krisis yaitu, mengaktifkan seperangkat simpul-simpul sosial-budaya sebagai strategi bertahan hidup. Strategi tersebut adalah perilaku yang muncul secara spontan ketika berhadapan dengan situasi-situasi sulit, yaitu menggalang solidaritas kekeluargaan atau solidaritas sosial untuk memobilisasi dan menyatukan seluruh sumber daya terbatas yang ada pada masing-masing anggota kelompok. Dalam solidaritas kekeluargaan atau solidaritas sosial, pelaku-pelaku UKM lebih mudah mengantisipasi situasi-situasi sulit dan mencekam.

METODE PENELITIAN

Pemikiran ini, saya kemukakan berdasarkan proses yang saya temukan pada masyarakat nelayan Muara Angke di Jakarta Utara. Bagaimana mereka menghadapi kompetisi mendapatkan akses ke sumber daya perikanan di perkotaan (urban area), bagaimana peran struktur sosial-budaya dalam ekonomi mendominasi dan melekat dalam kehidupannya secara

turun temurun, serta bagaimana hubungannya dengan berbagai pelaku dan institusi formal dalam jaringan kegiatan usaha perikanan (Rudiati, 1997; Nadia, 2016; Anisa dkk., 2017). Proses tersebut berlangsung dalam suatu jaringan integratif di antara berbagai pranata ekonomi, sosial-budaya, birokrasi dan bisnis yang kemudian membentuk jaringan sosial masyarakat nelayan.

Dalam struktur masyarakat Jakarta, nelayan berada pada posisi bawah bersama para buruh dan pedagang mikro dan kecil menengah. Mungkin sedikit lebih baik dari pedagang asongan dan para pemulung. Apa yang berlangsung pada ekonomi masyarakat nelayan, hampir memiliki kesamaan dengan masyarakat usaha kecil lainnya. Deskripsi strategi ataupun upaya yang dilakukan nelayan supaya tetap eksis dalam mata pencahariannya, adalah sebagai *entry point* untuk memahami bagaimana kelompok-kelompok masyarakat kecil bergerak dalam roda perekonomian lokal, regional dan bahkan nasional. Deskripsi kualitatif didapatkan melalui catatan etnografi pedagang kecil di lingkungan Muara Angke Jakarta Utara. Penulis melakukan pengamatan dan wawancara terhadap beberapa informan dan jaringannya. Analisa jaringan sosial dilakukan dalam membuat kesimpulan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fluktuatif Ekonomi Bagian Kehidupan Sehari-hari

Krisis ekonomi nasional bagi UMKM seperti tak kunjung berakhir, di tahun 1998 hingga kini. Di masa itu banyak para pengusaha kecil, menutup usahanya dengan berbagai sebab, yaitu bahan baku yang semakin langka, walaupun ada mahal

harganya, atau pasar yang mengalami penyempitan, akibat menurunnya daya beli masyarakat, atau kurangnya modal kerja. Dalam berbagai permasalahan ekonomi nasional, kelompok masyarakat yang paling terkena akibatnya adalah kelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki usaha kecil antara lain: pedagang asongan, pedagang bakul, pedagang kaki lima, pedagang gerobak, pedagang kios atau warung, petani dan nelayan.

Bila institusi formal belum berfungsi dengan baik, maka terdapat kemungkinan potensi berbagi resiko dan mengakumulasi aset (saweran) di antara pelaku UMKM. Terlebih lagi apabila sistem birokrasi formal membuka kesempatan terjadinya manipulasi dalam memanfaatkan aset negara yang ada. Para pelaku pemasaran berkolaborasi dengan aparat pemerintah untuk memperoleh dan menggunakan aset bantuan usaha kecil, misalnya merubah bentuk hubungan di antara UMKM dan dinas Koperasi dan UKM, menjadi hubungan yang bersifat askriptif (Plattner, 1989: 210-218). Mereka memanfaatkan hubungan kekerabatan dan bila tidak, membangun hubungan kekerabatan semu (*pseudo kinship*), yaitu kekerabatan bukan hanya dalam arti pertalian darah dan perkawinan saja melainkan juga yang tumbuh berdasarkan kesamaan, kepentingan, persamaan nasib atau agama dan keyakinan (Keesing, 1971; Gellner, 1994; dan Stack, 1980). Bentuk hubungan seperti ini dikategorikan sebagai hubungan-hubungan personal. Kemudian hubungan personal dikembangkan ke dalam hubungan-hubungan yang lebih luas lagi, yaitu hubungan bisnis. Memadukan hubungan personal ke dalam hubungan bisnis menjadi bagian dari proses transaksi yang umum berlangsung dalam masyarakat

manapun, tidak hanya pada masyarakat ekonomi. Yang terbanyak membentuk hubungan seperti ini adalah UMKM. Bentuk hubungan-hubungan seperti tersebut, berlangsung sesuai kesepakatan di antara mereka. Setiap waktu selalu ada hubungan lanjutan atas dasar saling percaya antara individu-individu dengan mitra-mitra dagangnya. Rudiatin, 1997 berpendapat; pinjaman-pinjaman yang didapat dari pedagang akan mengalami perpanjangan dengan syarat ada jaminan barang atau tunai untuk pengganti modal. Di kalangan UMKM, tanpa jaminan pinjaman tetap dapat diberikan.

Kepercayaan adalah Faktor Penting untuk Memudahkan untuk Mendapatkan Pinjaman Jangka Panjang

Hubungan pengulangan pinjaman akan memperlama hubungan kerja antar produsen dengan pedagang; (1) apakah perpanjangan kredit terjadi disebabkan petani tanpa pilihan memberikan hasil panen kepada pedagang dengan harga ditetapkan sebelum harga jual nyata berlaku; (2) atau adanya jaringan integratif antara pedagang besar dan pedagang eceran terjadi, karena pedagang eceran berhutang pada pedagang besar; (3) atau secara lebih lengkap bahwa adanya jaringan informasi bersama tentang harga, mutu komoditi dan kondisi pengadaan barang (Rudiatin, 1997). Terhadap bentuk hubungan bisnis ini, disebabkan hubungan yang lama umumnya terjadi lebih banyak disebabkan biaya produksi yang besar tidak mampu diatasi sendiri oleh nelayan, sehingga nelayan membutuhkan bantuan biaya dari pedagang. Apabila biaya produksi hari ini tidak dapat tertutupi dari hasil produksi, maka pembayaran diangsur di hari berikutnya, demikian seterusnya. Sedangkan tidak satupun di antara nelayan dapat memastikan

berapa. Produksi yang dapat mereka capai hari ini atau besok. Kondisi ketidakpastian dan usaha mereduksi resiko ini bagi nelayan memberi corak pada sistem bagi hasil, pinjam meminjam dan gadai menggadai di dalam hubungan sosial mereka. Corak sistem ini bersifat unik dan enkulturatif, perlu pemahaman antropologis-ekonomi. Kompleksnya kegiatan ekonomi mendorong sejumlah aktifitas sosial sebagaimana yang ditemukan Malinowski (1961) dalam perdagangan “kula”, sehingga perdagangan yang berlangsung di dalamnya memiliki keterkaitan dengan sejumlah tradisi dan aturan-aturan. Sebagaimana dikatakan pula oleh Levi Strauss, barang-barang bukan komoditi ekonomis, namun sarana bagi realitas sebuah tatanan yang lain seperti: kekuasaan, pengaruh, simpati, status dan emosi. Komunitas “kelompok” manapun dalam masyarakat modern walaupun sudah bergerak menuju pola yang global, masih banyak berorientasi pada pola partikularistik, askriptif dan rasa hormat (penghargaan) yang berkembang dan berkelanjutan (Long, 1977). Hal ini yang menjadi alasan mengapa di tingkat komunitas masyarakat usaha kecil, ikatan pertemanan, kekerabatan dan ketetangaan mempunyai banyak orientasi partikularistik dan askriptif. Pada umumnya di latarbelakangi kebutuhan dan kendala yang di hadapi dalam sistem ekonominya. Ibnu Khaldun menyatakan masyarakat kota diatur oleh jaringan, dimana persekutuan yang dibentuk berdasarkan pertalian keluarga, pertukaran jasa, daerah asal yang sama, pengalaman institusional yang sama, serta juga perekat paling kental yaitu kesamaan (keyakinan pribadi) atau ‘Iman’(beralasan atau tidak) yang pada umumnya berlandaskan pada hubungan-hubungan informal. Pada akhirnya

masyarakat tampaknya tidak memiliki perekat lain selain keyakinan “iman” di satu sisi dan kesetiaan di sisi lain, yang dulu bersifat etnik, sekarang bersifat klien (Gellner, 1994: 32). Sehingga dapat dikatakan unsur kekerabatan menjadi bersifat kontekstual. Jaringan hubungan pertemanan, kekerabatan dan berbagai kesamaan; latarbelakang, asal daerah atau iman (keyakinan) dijadikan sebagai dasar membangun ikatan “kepercayaan”, satu nilai terpenting dalam hubungan bisnis masyarakat kecil. Oleh sebab itu bentuk susunan (struktur) sosial dari kelompok-kelompok masyarakat usaha kecil harus dilihat sebagai jaringan manusia-manusia yang bergerak berdasarkan pilihan-pilihan moral-rasional.

Whitten dan Wolfe (Macmillan, 1986) mendefinisikan jaringan sosial sebagai serangkaian hubungan yang terbentuk diantara individu-individu dengan maksud membentuk sebuah basis guna memobilisasi mereka dan juga orang lain menghadapi suatu kondisi tertentu. Oleh sebab itu dapat dipahami mengapa hubungan kelompok usaha kecil dan pemberi/peminjam modal (yang lebih sering dimasukkan ke dalam kategori tengkulak) secara historis sangat langgeng dari waktu ke waktu dan tidak dapat dipatahkan oleh kehadiran lembaga formal beserta kebijakan yang menyertainya. UMKM menjalin hubungan-hubungan dengan kelompok-kelompok di luar masyarakatnya, setuju atau tidak setuju, sesuai dengan kepentingannya pada kelompok-kelompok tersebut dan upayanya untuk mempermudah mendapatkan sumber daya seperti; modal serta fasilitas pendukung produksi dan pemasaran a.l. surat izin usaha, meliputi: penangkapan, pemasaran dan pengolahan, serta rumah, kredit dan tempat berjualan, untuk dapat

ambil bagian dalam usaha perikanan nasional. Hubungan diperluas dalam struktur lokal hingga nasional dengan menjadi anggota dalam berbagai organisasi seperti; Himpunan Nelayan dan Tani, Kelompok Pedagang Asongan, Kelompok Pedagang Pasar atau Kelompok UKM, Koperasi-koperasi UMKM termasuk juga organisasi sosial di lingkungan dimana dia berada seperti; di lingkungan kampung, tetangga ataupun kekerabatan (Rudiati, 1997). Dengan demikian pada masyarakat UMKM, banyak kemungkinan variasi bentuk-bentuk jaringan yang muncul. Sekaligus menjelaskan dua kecenderungan paling banyak terbentuknya jaringan di kalangan UMKM yaitu patron-klien dan pertemanan. Termasuk juga jaringan kekerabatan dan brokerage, yang adalah kombinasi dan variasi diantara keduanya (Eisenstadt dan Roniger, 1984). Tindakan kelompok usaha kecil dalam kegiatan ekonominya merupakan refleksi dalam perilaku-perilaku yang muncul ketika menggunakan sumber daya untuk merealisasi kepentingan-kepentingan mereka, sedangkan perilaku-perilaku dimotivasi kepentingan-kepentingan sosial sebagai akibat kedudukan mereka sebagai anggota dan posisi mereka dalam struktur sosial. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut diwujudkan dalam aturan-aturan pada sistem hubungan kerja mereka, dimana aturan-aturan yang ada dalam hubungan kerja mereka menunjukkan sifat hubungan sosial yang ada. Apakah sifat hubungan; pribadi atau bisnis, serta landasan yang membentuk hubungan tersebut, yaitu adanya kepercayaan dan selanjutnya menumbuhkan kesetiaan terhadap mitranya.

Kemiskinan yang menempatkan kelompok usaha kecil berada pada lapisan paling bawah dalam struktur masyarakat

Indonesia, merupakan proses sosial dari interaksi perilaku dan budaya melalui serangkaian periode waktu. Manusia menyeleksi secara intensif dan menggunakan bagian-bagian dari kebudayaan mereka untuk menginterpretasi dan berinteraksi dengan lingkungannya, alam, sosial dan budayanya. Interaksi tersebut menimbulkan budaya yang saling membaaur yang menunjukkan suatu masyarakat dari struktur yang manapun, berkembang dan tidak statis. Perilaku kelompok usaha kecil di lingkungan manapun tidak saja merupakan implikasi dari lingkungan di mana dia berada, melainkan juga sebagai akibat dari kontak hubungannya dengan individu-individu lain yang memiliki budaya yang berbeda dengan latar belakang kehidupan kota/desa dalam suatu kurun waktu tertentu. Dalam perspektif antropologi perilaku mereka ini, adalah memadukan peran pranata-pranata sosial budayanya ke dalam kegiatan ekonominya.

Gejala perilaku seperti ini berlangsung pada hampir semua kelompok usaha kecil. Di sini penulis ingin menunjukkan bagaimana sistem ekonomi yang sesungguhnya berkembang pada masyarakat kecil di Indonesia. Penulis lebih cenderung menggunakan istilah kekuatan-kekuatan moral dalam ekonomi, sebab kekuatan-kekuatan material dan fisik yang berjalan pada kegiatan ekonomi sesungguhnya memiliki hubungan erat dengan faktor-faktor moral dan spiritual. Pemetaan antropologis terhadap fenomena ekonomi-politik masyarakat usaha kecil yang saya observasi dari tahun 1995 hingga tahun 1996, yaitu pada masyarakat nelayan Jakarta, menghasilkan temuan tambahan tentang bagaimana dua bentuk perilaku pertukaran saling berinteraksi komplementer (Rudiati, 1997). Apakah

aktifitas ekonomi yang berorientasi pasar, masuk ke dalam proses pertukaran yang didukung seperangkat aturan-aturan atau batasan-batasan moral masyarakat. Atau sebaliknya seperangkat aturan-aturan moral etik masyarakat mempengaruhi atau mendominasi aktifitas ekonomi yang berorientasi pasar. Apapun yang terjadi dari kedua proses tersebut menunjukkan bahwa, tidak satupun dari sistem-sistem besar ekonomi dunia, tampak dominan berkembang pada kelompok masyarakat seperti ini. Apakah sistem ekonomi masyarakat tersebut koheren dengan sistem ekonomi nasional? Ataukah sistem masyarakat tersebut justru menampilkan bentuk aslinya, setelah sistem ekonomi nasional justru tidak memberikan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan ekonomi global dan terutama tidak dapat menjalankan fungsinya memberi kesejahteraan bagi bangsa dan negara?

SIMPULAN

Ekonomi Pasar dan Kekuatan Agama-Budaya Dalam Kegiatan Ekonomi.

Sistem Ekonomi dipandang sebagai mekanisme yang digunakan dalam melakukan aktifitas ekonomi; mulai dari produksi, distribusi hingga konsumsi. Apabila kita berbicara mengenai sistem ekonomi kapitalis, maka kita segera menghubungkannya dengan ekonomi pasar. *Market orientation* diyakini sebagai penggerak kapitalisme, sehingga sistem ekonomi kapitalis dikatakan berbasis pasar. Perekonomian yang didasarkan pada sistem berusaha (*laissez faire*) adalah *self-regulating*, artinya mempunyai kemampuan untuk kembali ke posisi keseimbangannya secara otomatis. Oleh sebab itu pemerintah tidak perlu campur tangan. Landasan dari keyakinan ini adalah: (1) berlakunya hukum

yang menyatakan “*supply creates its own demand*” dan (2) beranggapan bahwa semua harga fleksibel. Pandangan yang diperoleh dari Adam Smith tersebut, dikenal dengan konsep “*Invisible Hand*”. Mekanisme pasar seperti ini akan dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang efisien dan juga dapat mencapai kemakmuran yang optimum. Dikatakan bahwa, pasar menganut *free competition*. Semuanya menjadi lain, ketika sekelompok pelaku ekonomi bergabung untuk mempengaruhi harga. Kecenderungan ini banyak terjadi pada komoditas-komoditas publik yang dikonsumsi oleh masyarakat luas dan memberi keuntungan yang tinggi, misal sembilan bahan pokok (sembako), listrik, air dan bahan bakar minyak (BBM). Apa bila harga cenderung naik terus dan tidak akan pernah turun, akan memunculkan perilaku ekonomi yang lain. Pemerintah harus mulai melakukan monopoli dengan mengatur stock barang dengan mengontrol harga, agar tetap dapat dijangkau masyarakat kecil. Apabila pelaku ekonomi kecil semakin sulit mengikuti mekanisme pasar, mereka akhirnya akan terlempar keluar. Sedangkan pelaku ekonomi besar semakin merambah mengambil alih semua yang ditinggalkan pelaku ekonomi kecil, inilah yang disebut sebagai proses konglomerasi. Ekonomi pasar yang semakin rasional, akhirnya dikatakan tidak dapat diterapkan di atas sendi-sendi tradisional dan moral. Pada kondisi inilah pemerintah mengambil tindakan, sebab telah terjadi *market failure* dengan dilanggarnya *code of conduct*. Akan tetapi seberapa kuat suatu pemerintah menjalankan perannya sebagai pengontrol pasar? Atau bahkan keterlibatan pemerintah malah cenderung mengakibatkan *government failure*? Pentingnya peran negara dalam mengatur perekonomian

rakyat, dideskripsikan oleh Ibnu Khaldun dalam bukunya “Mukkadimah” didasarkan pada penelitiannya terhadap sistem pasar pada dinasti Abbasiyah dan Umayyah. Selain itu, bagaimana perhitungan negara mengatur sirkulasi pemasukan dan pengeluaran bagi kesejahteraan rakyat, menjelaskan bagaimana faktor-faktor moral-material saling berinteraksi pada berjalannya sistem ekonomi. Uang, barang dan jasa tidak saja menyanggah fungsi bisnis dan ekonomi, tetapi juga fungsi sosial-budaya dan kesejahteraan (*social welfare*), antara lain: pajak, tabungan, investasi, sedekah, infak, zakat harta dan penghasilan, serta bentuk dan berjalannya persekutuan-persekutuan bisnis yang berorientasi *social welfare*.

Kita perlu menelaah juga penelitian Yoshihara Kunio yang menemukan berjalannya kapitalisme semu di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Malaysia. Penelitiannya menjelaskan begitu banyak faktor-faktor politik (terutama birokrasi) yang sangat mempengaruhi jalannya perekonomian nasional (Kunio:1989). Kehidupan ekonomi di beberapa Negara di Asia Tenggara, digambarkan didominasi oleh sistem ekonomi yang lebih banyak menerapkan nilai-nilai kapitalis, daripada sistem mix ekonomi. Kelompok kepentingan (sebagai buah kapitalis), telah memanfaatkan simbol-simbol budaya untuk mencapai kepentingan kelompoknya, apakah kelompok pedagang/pengusaha atau kelompok birokrat. Seperti misalnya budaya patron klien yang melahirkan birokrasi patrilineal. Pada era Soeharto, kapitalis semu semakin menjamur sepuluh tahun terakhir ini dan membawa dampak yang besar terhadap kehancuran sistem ekonomi di Indonesia. Konsep ideal sistem ekonomi Pancasila bukan semakin

menampakkan bentuknya, melainkan semakin kehilangan nilainya berganti dengan kapitalisme yang malu-malu memunculkan warna aslinya.

Kegiatan ekonomi adalah bagian integral dari masyarakat dan tidak dapat di kaji atau dimenej secara terpisah. Antropologi Ekonomi memandang pasar tidak saja sebagai arena jual beli, melainkan juga interaksi-interaksi sosial seperti terbukanya hubungan-hubungan yang bersifat lebih personal; pertukaran informasi ataupun membentuk solidaritas atau dasar kebersamaan etnis, kampung halaman, tujuan dan prinsip hidup, juga atas dasar keyakinan dan agama. Pada kegiatan Ekonomi seperti ini, kekuatan-kekuatan material dan fisik saling berintegrasi dengan faktor-faktor moral dan spiritual. Lembaga-lembaga di dalam masyarakat saling berinteraksi di dalamnya, antara lain: pemerintah, agama atau masyarakat itu sendiri. Tentang ini Adam Smith juga berpendapat bahwa ekonomi terkait dengan kehidupan sosial, tidak dapat dipahami jika terpisah dari kebiasaan, moral dan perilaku masyarakat (lihat tulisannya dalam “*The Theory of Moral Sentiments*”).

Pembahasan tentang perilaku ekonomi petani dan nelayan serta para pedagang kecil, sudah banyak menjadi bahan pembicaraan para ahli Antropologi Ekonomi. Pada umumnya mereka menghasilkan kesimpulan bahwa perilaku ekonomi kelompok masyarakat ini bersifat subsistensi, respons mereka terhadap ekonomi pasar yang rasional, negatif. Mereka terpaku pada sikap takut menghadapi resiko, yang kemudian lebih mengedepankan etika moral yaitu, subsistensi, saling tergantung satu sama lain dengan terlalu ketat, sehingga menghilangkan keinginan untuk mandiri progresif dan berpikir rasional produktif.

Pada masyarakat kecil, pembahasan sistem ekonominya senantiasa didominasi oleh sistem pertukaran yang berlangsung sederhana, tanpa birokrasi dan terikat erat dengan nilai “kepercayaan”. “Uang” bukan hal yang terpenting dalam menggerakkan roda perekonomian, melainkan prinsip-prinsip moral yang menyertai pertukaran ekonomi tersebut merupakan landasan terpenting membangun dan melanggengkan usaha.

Dalam kajian-kajian Antropologi Ekonomi, persoalan ekonomi nelayan, petani dan pedagang kecil lebih banyak didominasi dikotomi rasional versus subsistensi. Walaupun pada kemunculan Teori Ekonomi Politik Baru, dikotomi ini mendapat kritikan. Popkin tidak melihat tindakan para petani di Vietnam sebagai tindakan yang tidak rasional (Popkin, 1979; Bates, 1981). Justru tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para petani tersebut, dianggap sebagai rasional. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Robert Bates, tentang pasar dan negara, pasar dipergunakan oleh petani untuk menentang kebijakan negara yang tidak sesuai dengan kondisi para petani. J Carsten (1989:117) menemukan perbedaan perilaku antara nelayan Melayu dengan pedagang Cina, dikatakan bahwa kegiatan bisnis nelayan Melayu banyak didasarkan pada moral kekerabatan, sedangkan pedagang Cina lebih berorientasi komersial dan profit. Akibatnya pedagang Cina dalam bisnis lebih sukses daripada nelayan Melayu. Akan tetapi apakah prinsip moral yang menyertai pertukaran material senantiasa mendatangkan hal-hal negatif? UMKM sangat sarat dengan nilai demikian.

“Kepercayaan” Sebuah Prinsip Pertukaran Ekonomi

Penulis berpendapat, pada kenyataannya terdapat dua tipe yang berintegrasi secara komplementer dalam kegiatan ekonomi kelompok masyarakat ini a.l.: (1) tipe perdagangan yang di dalamnya terdapat hubungan sosial kekeluargaan dan perilaku pelaku-pelaku ekonomi yang bersifat subsisten, non-profit dan moral-religius; (2) tipe perdagangan yang dilakukan tanpa melibatkan hubungan-hubungan personal di antara pelaku-pelaku ekonomi dan bermotivasi pada prinsip-prinsip rasional-produktif dan memaksimalkan profit. Kepada kedua bentuk ini, baik subsisten maupun rasional, kita tidak dapat menarik garis pemisah secara tegas, sebab keduanya tidak dapat dimenej secara terpisah.

Pemikiran adanya hubungan integrasi komplementer moral-rasional pada masyarakat usaha kecil, penulis adopsi dari bentuk perilaku ekonomi masyarakat nelayan (Rudiatin, 1997). Perilaku ekonomi mereka diidentifikasi sebagai berikut: (1) hubungan yang lama antara pengusaha kecil dengan pedagang merupakan bagian dari kebudayaan yang ditemukan dalam setiap masyarakat usaha kecil, untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Mereka sangat memelihara hubungan ini, yaitu lebih mengutamakan menjual hasil produksinya pada pedagang yang memiliki hubungan dekat dengannya daripada pembeli asing yang menawarkan harga tinggi, yang dalam prinsip ekonomi, perilaku dagang seperti ini dianggap merusak ekonomi (Acheson, 1981; Firth, 1975; Plattner, 1989 dan Sunimal,1985); (2) hubungan yang lama ini pada akhirnya membentuk pola jaringan sosial di kalangan kelompok usaha kecil, ditujukan untuk dapat memperoleh dan mempergunakan sumber daya apa saja, yang berada dalam rangkaian kegiatan ekonomi nasional, sehingga tetap eksis

dalam usahanya. Tingkat kestabilan suatu jaringan bergantung pada jarak yang terdekat dari sumber daya dan kekuasaan. Jaringan sosial yang sudah terbentuk tersebut pun perlu dipertahankan, dengan maksud agar tetap berada dalam suatu jaringan usaha, karena sekali keluar belum tentu bisa lebih baik lagi atau bahkan dapat masuk lagi dalam jaringan tersebut. Jaringan sosial difungsikan atau digunakan sebagai alat memfleksibelkan kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan, dapat dipahami mengapa pranata non formal lebih berperan dibandingkan pranata formal; (3) Budaya yang terbentuk di dalam sistem hubungan kerja mengisyaratkan selain hubungan tersebut menyebabkan arus barang dan jasa, juga menghubungkan produsen dan konsumen dalam kekerabatan dan pertemanan. Hubungan tersebut cenderung menetap, bukan terbatas pada hubungan yang singkat (*short-term*). Kelanggengan hubungan (*long-term*) ini mengukuhkan pembiayaan usaha cara kredit/pinjaman jangka panjang; (4) Hubungan pertemanan dan kekerabatan yang diperluas menjadi hubungan etnis, dijadikan sumber manfaat atau mata pencaharian. Untuk menjamin hari depan mereka dilakukan melalui jaringan kekerabatan yang oleh Ibnu Khaldun disebut solidaritas sosial; (5) “Kepercayaan” merupakan satu nilai yang mendasari berbagai hubungan (sosial dan bisnis), oleh karena itu pinjam meminjam sering tanpa jaminan. Dari hubungan saling percaya berkembang hubungan tolong menolong dan kerjasama dan berbagi rezeki dalam mata pencaharian.

Selanjutnya kewajiban moral (agama) menjadi prinsip dasar kelanjutan hubungan. Perilaku ekonomi nelayan tersebut memadukan prinsip moral dan rasional, didasarkan kepada keyakinan (Ibnu

Khaldun menyebutnya iman) terhadap ajaran agamanya (dalam hal ini Islam), yang menggiatkan sedekah, zakat dan infak bagi orang-orang yang kurang mampu. Keyakinan ini bersifat turun temurun dan menjadi kebiasaan dalam seluruh kehidupan mereka. Etnis-etnis tertentu seperti Bugis, Madura, Banten, Betawi, di masyarakat nelayan memegang teguh prinsip agama Islam ini selama beberapa generasi hingga kini. Sementara etnis-etnis yang lain mensinkretiskan keyakinan mereka, sehingga ajaran agama Islam tidak dominan, telah bersinkretis dengan budaya lokal. Semua prinsip dan keyakinan ini tertanam dalam *backmind* mereka, dan mewarnai seluruh perilaku dan kebiasaan mereka. Demikian budaya ekonomi masyarakat pelaku UMKM yang membuat mereka mampu bertahan dalam berbagai kesulitan ekonomi.

Diskusi: Kepentingan Pemerintah Terhadap UMKM Untuk Mengatasi Masalah Nasional?

Penandatanganan Masyarakat Ekonomi ASEAN sejak tahun 2015 merupakan suatu perdagangan bebas yang bisa dilakukan khususnya antar anggota ASEAN. Kesepakatan ini telah dilakukan bersama yang bertujuan agar kawasan dari negara-negara yang termasuk di ASEAN tersebut akan lebih makmur, stabil dan juga menciptakan perdagangan yang kompetitif. Banyak dampak yang telah di bawa dengan adanya sistem Masyarakat Ekonomi ASEAN tersebut, khususnya dalam segi perekonomian yang tak lain arus dari barang maupun jasa, hingga tenaga kerja dan juga investasi modal yang terjadi. Dengan adanya sistem ekonomi yang luas tersebut, maka masyarakat Indonesia tentunya juga memiliki tantangan tersendiri untuk menciptakan usahanya. Di sisi lain,

beragam jenis peluang harus bisa dimasuki oleh masyarakat Indonesia sehingga bisa mengikuti tantangan sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN. UMKM bisa menjadi salah satu faktor yang mendorong agar perekonomian di Indonesia mengalami kemajuan sekalipun tantangan dari MEA terus berlanjut. Selain itu juga, dengan menjalankan UMKM, banyak peran yang akan dipenuhi, mulai dari memberikan lapangan kerja sehingga mengurangi angka para pengangguran, membantu yang kurang penghasilan atau meningkatkan penghasilan masyarakat dan juga lebih banyak lagi.

Setelah 1998 UMKM dijadikan primadona oleh pemerintah, sebanyak 27 instansi mengurus UMKM, atau UKM (Usaha Kecil Menengah) atau IKM (Industri Kecil Menengah). Saat ini jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia ada lebih dari 50 juta unit usaha dengan pertumbuhan rata-rata di atas dua persen dalam lima tahun terakhir serta pertumbuhan pekerja yang hampir sama banyaknya. Sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto tahun 2012 sebesar 57.46 persen (BPS, 2014). Sebagai jenis usaha yang banyak dimasukkan dalam sektor ekonomi informal, maka UMKM juga memiliki sifat-sifat dasar sbb: Mereka umumnya berada dalam unit usaha berskala kecil, dengan kuantitas yang cukup banyak, tidak terkena pajak. Karakteristik lainnya adalah kepemilikan oleh individu, menggunakan teknologi yang sangat sederhana, sulit untuk mengakses permodalan ke lembaga keuangan, umumnya memiliki produktifitas tenaga kerja yang juga rendah serta tingkat upah yang rendah pula.

Harapan paling besar terhadap UMKM dari pemerintah adalah daya serapnya terhadap sektor tenaga kerja. Semakin banyak UMKM di Indonesia,

pemerintah semakin berpeluang mengurangi tingkat pengangguran dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Demikian juga yang dinyatakan oleh Ahmad Dading Gunadi, Direktur UKM dan Koperasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang membacakan sambutan Rahma Iryanti, Wakil Menteri Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, “UKM Indonesia adalah salah satu pilar ekonomi negara. Sekitar 99 persen bisnis di Indonesia adalah UKM dan mereka adalah penyedia pekerjaan utama di Indonesia. Oleh karena itu, pertemuan ini sangat penting bagi Indonesia dan pembuat kebijakannya untuk mengembangkan dan merumuskan kebijakan yang lebih terkoordinasi dan koheren mengenai UKM”. Sambutan ini diberikan pada Kursus pelatihan, bekerjasama dengan ILO, dan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) (ILO News, 22 Juni 2017). Besarnya harapan pemerintah/negara terhadap UMKM, apakah berbanding lurus dengan besarnya anggaran dan fasilitas serta kemudahan berusaha yang diperoleh UMKM? Ataukah sesungguhnya UMKM demikian mandirinya dalam menghadapi persaingan usaha di era MEA yang sangat ketat ini?

Rekomendasi: Budaya Ekonomi UMKM versus Kebijakan-kebijakan UMKM

Usaha Kecil dan Menengah atau UKM bisa menjadi salah satu faktor yang mendorong agar perekonomian di Indonesia mengalami kemajuan sekalipun tantangan dari MEA terus berlanjut. Selain itu juga, dengan menjalankan UKM, banyak peran yang akan dipenuhi, mulai dari memberikan lapangan kerja sehingga mengurangi angka para pengangguran, membantu yang kurang

penghasilan atau meningkatkan penghasilan masyarakat dan juga lebih banyak lagi. Mencari peluang usaha sebagai tantangan MEA di tahun 2018. Dengan kata lain, berupaya untuk membuka peluang usaha dan menjalankan usaha secara mandiri yang bisa dilakukan dengan sangat mudah saat ini bila dilihat dari tingginya perhatian pemerintah terhadap UKM.

Pemerintah perlu banyak *merefer* budaya UMKM yang bertipe kekrabatan, berbagi rezeki dan resiko, menjunjung tinggi “kepercayaan” dalam bertransaksi dari cara pandang praktek ekonomi konvensional. Kebijakan pemerintah yang selama ini menjadikan UKM sebagai pelengkap ekonomi nasional perlu dibalik dengan sebuah kebijakan ekonomi nasional yang berorientasi terhadap ekonomi UMKM. Mulai dari pembangunan infrastruktur dan fasilitas bagi berjalannya roda perekonomian nasional tidak saatnya

lagi diprioritaskan pada industri skala besar saja, karena sudah terbukti UMKM dengan budayanya yang unik dan eksklusif itu mampu bertahan dalam berbagai krisis. Implementasi kebijakan terhadap UMKM perlu didasarkan atas berbagai penelitian kualitatif bersifat partisipan dan bukan hanya asumsi sebagaimana format ekonomi nasional yang cenderung kapitalis. Banyak aset ekonomi UMKM dalam operasionalnya tidak masuk dalam hitungan angka-angka statistik ekonomi, seperti hubungan-hubungan, jaringan yang dibangun dengan dasar kepercayaan, nilai-nilai agama dan budaya yang mengikat erat antar individu dan mobilitas kekrabatan dan pseudo kekrabatan (ketetangaan dan pertemanan) lebih mengeksplorasi kerjasama daripada persaingan bebas yang umum ditemukan dalam teori ilmu ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Acheson J (ed.) 1994, *Anthropology and Institutional Economics. Monographs in Economic Anthropology, Society for Markets: Anthropological Aspects Economic Anthropology*. University Press of America, Lanham, MD
- Anisa, dkk, 2018, *Eksplorasi Kondisi Fisik Dan Non Fisik Pada Pemukiman Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional Di Kampung Nelayan Pengasinan, Muara Angke, Langkau Betang, Jurnal Arsitektur Untan, Vol 5, No 1 (2018)*
<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/lb/article/view/25771>
- Bates, Robert H., 1981, *Markets and States in Tropical Africa: The Political Basis of Agricultural Policies*, University of California Press, 178 pages
- Carsten, Janet. 1989. *Cooking Money: Gender and the Symbolic Transformation of Means of Exchange in a Malay Fishing Community*. In J. Parry and M. Bloch (eds.): *Money and the Morality of Exchange*.
- Eisenstadt, Schmucl, 1968, *Social Institution*, David L.Sills, ed. *The International Encyclopedia of The Social Sciences*, 16 edition, hlm. 283-291
- Eisenstadt and Roniger, 1984, *Patron, Client and Friends: Interpersonal Relation and The Structure of Trust in Society*, London, Cambridge University Press

- Gellner, Ernest, 1995, *Membangun Masyarakat Sipil: Prasyarat Menuju Kebebasan Aswab Mahasin* (Introduction), Ilyas Hasan (Translator)
- Geertz, Clifford, 1978, "The Bazaar Economy: Information and Search in Peasant Marketing." *American Economic Review* 68:28-32.
- _____, 1963, *Peddlers and Princes Social Development and Economic Change in Two Indonesian Towns*
- Kunio, Yosihara, 1990, *Kapitalis Semu di Asia Tenggara*, LP3ES
- Long, Norman, 1986, *The Commoditization debate: labour process, strategy and social network*, Agricultural University Wageningen
- Listiyandra, Krishna, dkk, 2016, *Kontribusi Wanita Nelayan Dalam Upaya Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga Nelayan Di Muara Angke Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara*, *Jurnal Perikanan Kelautan* Vol. VII No. 2 /Desember 2016 (80-90), <http://jurnal.unpad.ac.id/jpk/article/view/11364>
- Nida, Nadhia, R.A, 2016, "Buruh Angkut dan Keluarga Nelayan di Pelabuhan Muara Angke" *Lembaran sejarah, Jurnal UGM*, Vol 12, No 1, 2016, <https://jurnal.ugm.ac.id/lembaran-sejarah/article/view/25519>
- Plattner, Stuart, 1989, *Economic Anthropology*, Ed. Stanford University Press, Stanford, CA, 1989. xiv, 487 pp.
- Rudiatin, Endang, 1997, "Kepercayaan dan Kesetiaan: jaringan Sosial Masyarakat Nelayan di Muara Angke Jakarta", Thesis Pasca Sarjana, Universitas Indonesia
- Sunimal, Fernando, 1985, *The Marketing System in The Small Scale Fishery of Srilanka: Does The Middleman Exploit The Fisherman?*, in "Small Scale Fisheries in Asia" *Socioeconomic Analysis and Policy*, ed. Theodore Panyotou, The International Development Research Centre , Ottawa Canada, pp 12-31
- Indonesian Economy: Micro, Small & Medium Sized Enterprises* 03 Agustus 2016 <https://www.indonesia-investments.com/id/news/todays-headlines/indonesian-economy-micro-small-medium-sized-enterprises/item7068?>
- ILO, 2017, "Indonesia policy makers to better coordinate on SME policies" 22 June 2017 http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_561816/lang--en/index.htm.

